

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Refika Aditama. Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Basah, Sjahcran. 1987. *Sengketa Administrasi, Tulisan pada Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jurusan HTN. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fahmal, H.A. Muin. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Total Media. Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak di Lingkungan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press Indonesia. Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Total Media. Jakarta.
- Marbun, S.F. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Masbakar, A. Fahmal dan Muin. 1984. *Hukum Administrasi Negara I (Ketetapan, Freies Ermessen, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Peradilan Administrasi Negara)*. Zainal Bintang. Ujung Pandang.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Salim, Amrullah. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Dalam Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Syaukani, H. 2003. *Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta.

Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia. Surabaya.

Wijk, H.D van/Willem Konijnenbelt. 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht, Uitgeverij*. Lemma. B.V. Utrecht.

### **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Rudyat, Charlie. (tanpa tahun). *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Pustaka Mahardika. Yogyakarta.

Shadily, Hasan dan John M. Echmols. 1982 *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia. Jakarta.

### **Hasil Penelitian**

Haan, P. de, dkk. 1986. *Bestuursrecht in de Sociale rechstaat \*Deel 1), Ontwikkeling, Organisatie, Instrumentarium, Kluwer-Deventer*.

Man, Kamain. 2006. *The hearing obligation as a general principle of good administration, Jurassic Falconis*, vol. 42, 2005-2006, No. 3, p. 331-376, M. VAN HOECKE, "The general principles of law as a source of law", in M. VAN HOECKE (ed.), *General Principles*. Kluwer Law School.

### **Jurnal Makalah**

Alatas, Syed Hussain. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

Bahan Penataran Kerjasama Indonesia-Belanda untuk Pengajar Hukum Administrasi. 1985. Surabaya.

Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 1993. *Dephub DJPL Materi Penyuluhan Kesyahbandaran*.

Pratiwi, Cekli Setya, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. sebuah projek yang di danai oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan diimplementasikan oleh Center for International Legal Cooperation (CILC), bekerjasama dengan Indonesian Institute for Independent Judiciary (LeIP).

Santosa, Mas Achmad. (Tanpa Keterangan dan Tahun). "UU KMI: Langkah Awal Menuju Pemerintahan Demokratis, Terbuka dan Transparan", *Handout, Koalisi Kebebasan Memperoleh Informasi*.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Azhar, Muhamad. 2015, Skripsi: *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Mahfiroh, Rochati. 2013. Skripsi: *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Sebagai Dasar Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Sengketa Kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2000 – 2010*. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Putra, Negarawan Adhitama. 2015. Skripsi: *Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi Pada PTUN Semarang)*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Wairocana, I Gusti. 2005. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Implementasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bali*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang -Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)  
Staatblad. 1847 – 23.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Tahun Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 6 Tahun 2005 Tentang Pengukuran Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 26 Tahun 2006 Tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan / Penggantian Bendera Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 204).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283).

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### Sumber Internet

Berita Trans. *Ditjen Hubla Kukuhkan 60 Ahli Ukur Kapal*. <http://beritatrans.com/2016/02/19/ditjen-hubla-kukuhkan-60-ahli-ukur-kapal/>, diakses pada 16 November 2017.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. 2014. *Tingkatkan Layanan Kepada Masyarakat, Kementerian Perhubungan Luncurkan Contact Center 151*. <http://dephub.go.id/berita/baca/tingkatkan-layanan-kepada-masyarakat,-kementerian-perhubungan-luncurkan-contact-center-151/?cat=QmVyaXRhfHNIY3Rpb24tNjU=>, diakses pada Rabu, 28 Februari 2018 pukul 17.16 WIB.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan. 2017. *Sebagian Layanan Satu Atap Kemenhub Pindah ke Lantai Satu Agar Mudah di Akses*. <http://dephub.go.id/post/read/sebagian-layanan-satu-atap-kemenhub-pindah-ke-lantai-satu-agar-mudah-di-akses>, diakses pada Rabu, 28 Februari 2018 pukul 16.47 WIB.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Tugas dan Fungsi Ditkapel*. <http://hubla.dephub.go.id/unit/ditkapel/Pages/Tugas-Fungsi.aspx>, diakses pada Kamis, 09 November 2017, pukul 17.09 WIB.

Hidayat, Anwar *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017 pukul 11.52 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 22.38 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul 22.32 WIB.

Kompas. 2017. *Pemilik Enggan Mendaftarkan Kapal*. <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170722/281917363138310>,

diakses pada Jum'at, 3 November 2017, pukul 02.27 WIB. diakses pada Jum'at,  
3 November 2017, pukul 02.27 WIB.

Von Bernd Grzeszick, Erlangen. 2006. *Das Grundrecht auf eine gute Verwaltung – Strukturen und Perspektiven des Charta-Grundrechts auf eine gute Verwaltung, Europarecht, In Verbindung mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Europarecht*  
[http://www.europarecht.nomos.de/fileadmin/eur/doc/Aufsatz\\_EUR\\_06\\_02.pdf](http://www.europarecht.nomos.de/fileadmin/eur/doc/Aufsatz_EUR_06_02.pdf).